



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ACEH

KATA PENGANTAR



Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh tahun 2025 triwulan III telah selesai disusun. Laporan ini untuk menyajikan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh tahun 2025 dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta berdasarkan perkembangan indikator yang ada.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Aceh di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan kinerja SKIPM Aceh pada masa yang akan datang.

Aceh Besar, 20 Oktober 2025

Kepala SKIPM Aceh



Diky Agung Setiawan S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
i Daftar Isi	ii
ii Daftar Tabel.....	iii
iii Daftar Gambar.....	iv
iv Ringkasan Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Arah Kebijakan Isu Strategis.....	5
1.3 Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi Misi	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	9
3.2 Anggaran	60
3.3 Sumber Daya Manusia.....	68
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Rekomendasi	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi IKS 01.01 Tahun 2025 Triwulan III	15
Tabel 2 Rekapitulasi Sertifikasi CPIB Kapal SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan III	16
Tabel 3 Target dan Realisasi IKS 01.02 Tahun 2025 Triwulan III	21
Tabel 4 Target dan Realisasi IKS 01.03 Tahun 2025 Triwulan III	26
Tabel 5 Target dan Realisasi IKS 01.04 Tahun 2025 Triwulan III	28
Tabel 6 Target dan Realisasi IKS 02.02 Tahun 2025 Triwulan III	32
Tabel 7 Target dan Realisasi IKS 03.02 Tahun 2025 Triwulan III	35
Tabel 8 Target dan Realisasi IKS 03.04 Tahun 2025 Triwulan III	38
Tabel 9 Target dan Realisasi IKS 03.05 Tahun 2025 Triwulan III	40
Tabel 10 Target dan Realisasi IKS 03.06 Tahun 2025 Triwulan III	43
Tabel 11 Target dan Realisasi IKS 03.07 Tahun 2025 Triwulan III	48
Tabel 12 Target dan Realisasi IKS 03.08 Tahun 2025 Triwulan III	52
Tabel 13 Detail Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2025 Triwulan III	57
Tabel 14 Target dan Realisasi IKS 03.01 Tahun 2025 Triwulan III	57
Tabel 15 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	61
Tabel 16 Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Tahun 2025	4
Gambar 2 Sasaran Strategis Tahun 2025	8
Gambar 3 Sasaran Kinerja Tahun 2025 Dalam Aplikasi Kinerja Sasaran Kinerja Tahun 2025	10
Gambar 4 Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2025 Triwulan III	11
Gambar 5 <i>Capture</i> Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2025 Triwulan III	12
Gambar 6 Rangkaian Kegiatan Sektor Produksi Primer	18
Gambar 7 Sertifikat CPIB Kapal	19
Gambar 8 Sertifikat HACCP dari Aplikasi HONEST	22
Gambar 9 Kegiatan Sektor Produksi Pasca Panen Tahun 2025 Triwulan III	24
Gambar 10 <i>Capture</i> Aplikasi Sidak KKP SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan III	43
Gambar 11 Tangkap Layar Nilai Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Sampai Dengan Tahun 2025 Triwulan III	47
Gambar 12 Jenis Layanan BPPMHKP Aceh	55
Gambar 13 Infografis Data Nilai Capaian Perolehan Survei Kepuasan Masyarakat SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan III	55
Gambar 14 <i>Capture</i> Portal Penilaian Hasil SKM SKIPM Aceh Pada Aplikasi Susan KKP Tahun 2025 Triwulan III	56
Gambar 15 Perbandingan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Tahun 2025.....	58
Gambar 16 Komposisi Pagu dan Detail Realisasi Tahun 2025 Triwulan III	60

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, SKIPM Aceh telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025 triwulan II. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja (IK) yang telah ditetapkan.

Dari seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja SKIPM Aceh tahun 2025 triwulan III seluruhnya memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai pencapaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) SKIPM Aceh tahun 2025 triwulan III adalah sebesar 118, 18 %. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi kinerjajaku dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran dan terdiri dari 15 indikator kinerja masuk dalam kategori istimewa (berwarna biru). Dari seluruh indikator kinerja yang dimiliki telah tercapai sesuai dengan target dan atau melebihi target yang ditetapkan, dengan perhitungan nilai posisi akhir. Nilai NKO tersebut ditunjukkan dari pencapaian sasaran strategis (SS) dan target Indikator Kinerja SKIPM Aceh sampai akhir triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebesar 70 % sampai dengan akhir triwulan III tercapai 100 %.
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebesar 70 % sampai dengan akhir triwulan III telah tercapai sebesar 100 %.
 - c. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebanyak 1 lokasi, akan dilakukan perhitungan pada periode akhir tahun.
 - d. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebesar 99 % akan dilakukan perhitungan pada periode akhir tahun.

2. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target senilai 0 , belum dilakukan perhitungan pada triwulan III.
3. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut
 - a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target senilai 0 belum dilakukan perhitungan pada triwulan III.
 - b. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target sebesar 85 %, belum dilakukan perhitungan pada triwulan III.
 - c. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh belum dilakukan perhitungan pada triwulan III.
 - d. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, belum dilakukan perhitungan pada triwulan III.
 - e. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target sebesar 85 %, pada triwulan III dapat tercapai sebesar 100 %.
 - f. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target sebesar 76 %, pada triwulan III dapat tercapai sebesar 100 %.
 - g. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, belum dilakukan perhitungan pada triwulan III.
 - h. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target senilai 88, dapat tercapai sebesar 98,02.

Realisasi anggaran Stasiun KIPM Aceh sampai dengan akhir triwulan III sebesar Rp 2.868.913.355,- atau setara dengan 73,75 % dari alokasi anggaran pagu revisi sebesar Rp. 3.688.889.000,. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap aktivitas, kebijakan, serta hasil akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban setiap instansi pemerintah untuk memberikan laporan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan kinerja serta penggunaan sumber daya publik secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan asas akuntabilitas tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol dan evaluasi terhadap efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini memuat capaian kinerja utama, realisasi target, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya laporan kinerja yang akuntabel, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah telah menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Selain itu, laporan tersebut juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang serta sebagai alat untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*result-based management*). Oleh karena itu, penguatan asas akuntabilitas melalui pelaporan kinerja yang transparan dan akurat merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh. Selain itu untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Pasa saat ini transformasi BPPMHKP masih dalam proses hingga ke seluruh UPT di Indonesia. Diharapkan seluruh proses perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ini dapat segera selesai sehingga berdampak pada kegiatan yang transformatif dan inovatif untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang akan terus berkembang.

Dalam rangka mendukung visi BPPMHKP yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Stasiun KIPM mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu :

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Stasiun KIPM Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, SKIPM Aceh dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi hingga pada tahun 2024 dalam melaksanakan misi yang telah ditentukan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh.

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan tahun 2024 SKIPM Aceh mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pegawai baik ASN maupun Non ASN. Adapun struktur organisasi SKIPM Aceh dapat dilihat dalam Gambar 1. sebagai berikut.

Gambar 1 Struktur Organisasi Tahun 2025



Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Aceh dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2. Arah Kebijakan Isu Strategis

Renstra KKP (Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk periode 2025-2030 secara umum fokus pada beberapa area utama, seperti:

1. Peningkatan Kualitas SDM:

- Meningkatkan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan inovasi.
- Mengembangkan SDM yang kompeten dan profesional di berbagai bidang kelautan dan perikanan.

2. Pengembangan Inovasi dan Riset:

- Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan inovasi dan riset.

3. Peningkatan Keberlanjutan:

- Meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Mencegah dan mengurangi pencemaran laut, serta melindungi ekosistem laut.

4. Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan:

- Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.
- Menciptakan lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan.
- Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan perikanan.

5. Penanganan Sampah Plastik:

- Mengelola sampah plastik secara berkelanjutan melalui pendekatan pentahelix dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Renstra KKP akan menjadi pedoman bagi KKP dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam periode 2025-2030 untuk mencapai visi dan misi pemerintah

1.3 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja BPPMHKP Aceh sampai akhir triwulan III Tahun 2025. Membandingkan antara capaian kinerja (performance results) dengan rencana kinerja (performance plan) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPMHKP Aceh sampai akhir triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia sejalan dengan Asta Cita Presiden Indonesia pada poin dua dan lima. Poin dua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Poin lima adalah melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Oleh karena itu visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diselaraskan dengan *Asta Cita*:

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

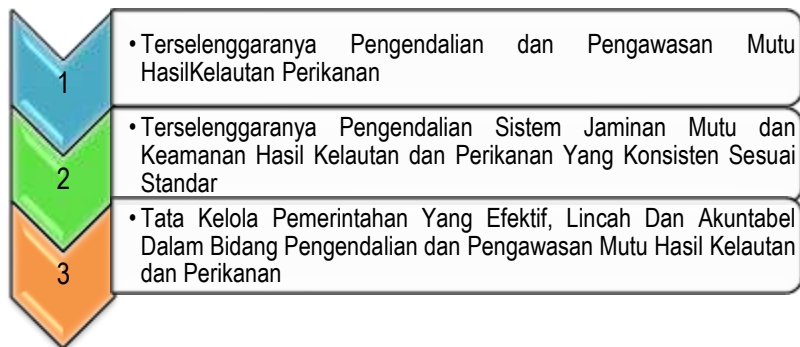
"Menjadi kementerian yang unggul dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberagaman hayati laut, serta memajukan ekonomi biru Indonesia."

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan
 - Mendorong pengelolaan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan untuk memastikan ekosistem laut tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Nelayan
 - Memberikan dukungan kepada masyarakat pesisir, nelayan, dan pelaku usaha perikanan melalui peningkatan kapasitas dan akses pasar, serta kebijakan yang berpihak pada mereka.
3. Memajukan Industri Perikanan dan Kelautan yang Inovatif
 - Mendorong riset dan pengembangan dalam sektor kelautan dan perikanan agar dapat menciptakan produk dan teknologi baru yang meningkatkan daya saing dan nilai tambah.
4. Mengembangkan Ekonomi Biru
 - Mendorong pemanfaatan potensi ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan, baik untuk sektor perikanan, pariwisata bahari, maupun energi laut.
5. Melindungi Keanekaragaman Hayati Laut

- Mengambil langkah-langkah nyata untuk melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati laut Indonesia sebagai kekayaan alam yang sangat penting bagi ekosistem global.
6. Menjaga Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Laut
- Meningkatkan produksi perikanan dan produk kelautan yang aman, sehat, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan.

Gambar 2 Sasaran Strategis Tahun 2025



Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 terdapat 16 Indikator Kinerja yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi SKIPM Aceh dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Aceh guna mendukung manajemen internal BPPMHKP.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja, BKIPM telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan periode pelaporan, sedangkan kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada laporan kinerja ini mengikuti pedoman pengelolaan kinerja pada aplikasi “kinerjaku” tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Angka maksimum tingkat capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU, sebagaimana berikut ini:

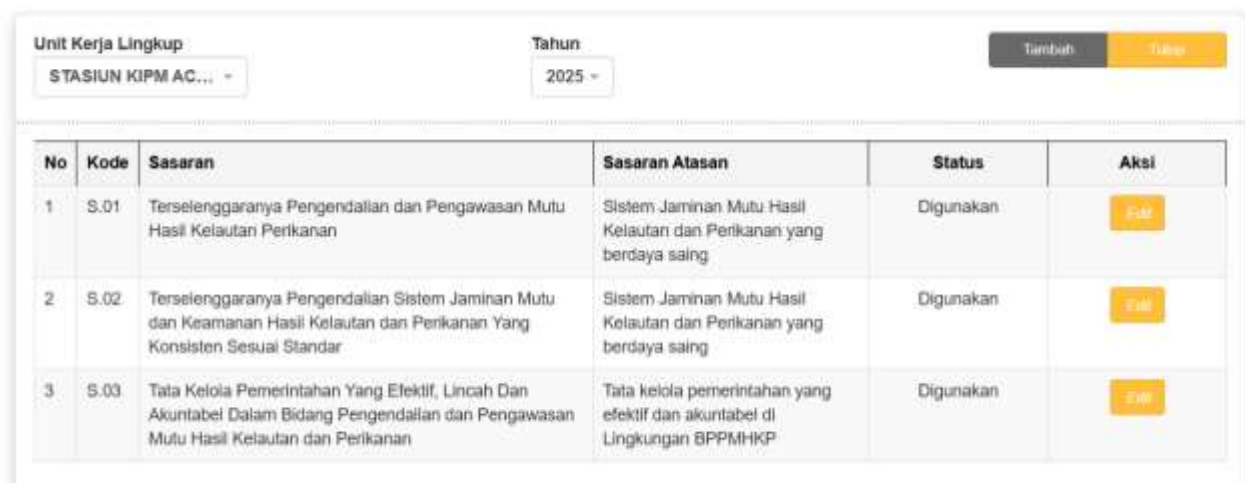
Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

4. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan;
5. IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan;
6. IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IK melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IK

stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

Akuntabilitas kinerja organisasi BPPMHKP merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkup eselon I. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup BPPMHKP, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 3 Sasaran Kinerja Tahun 2025 Dalam Aplikasi Kinerja Sasaran Kinerja Tahun 2025



No	Kode	Sasaran	Sasaran Atasan	Status	Aksi
1	S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	Digunakan	
2	S.02	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	Digunakan	
3	S.03	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP	Digunakan	

(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2025)

Gambar 4 Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2025 Triwulan III



(Sumber : Aplikasi Kinerja KKP, 2025)

Sampai periode akhir tahun 2025 triwulan III, unit kerja SKIPM Aceh memperoleh nilai pengukuran skor kinerja (NKO) September sebesar 118,18. Nilai ini berdasarkan perhitungan secara otomatis yang terpotret melalui aplikasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat portal <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Pada aplikasi ini secara sistematis menjelaskan uraian indikator sasaran, sasaran indikator kinerja beserta pengukuran dan penilaiannya. Capaian atas 15 indikator kinerja SKIPM Aceh yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 5 Capture Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2025 Triwulan III

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target September	Capaian September	%	Target s/d September	Capaian s/d September	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						120,00			120,00		
IKS 01.01	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1 ✓ [] Tambah Data Dukung +	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	70,00	100,00	120,00	01-Oct-2025 11:22
IKS 01.02	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Data Dukung1 ✓ [] Tambah Data Dukung +	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	70,00	100,00	120,00	01-Oct-2025 11:22
IKS 01.03	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tambah Data Dukung +	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		01-Oct-2025 11:22
IKS 01.04	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tambah Data Dukung +	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99,00	0,00			0,00	0,00		01-Oct-2025 11:22
S.02	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar											
IKS 02.01	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tambah Data Dukung +	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		01-Oct-2025 11:22
IKS 02.02	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tambah Data Dukung +	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		01-Oct-2025 11:22
S.03	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						118,38			118,38		
IKS 03.01	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tambah Data Dukung +	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	0,00			0,00	0,00		01-Oct-2025 11:22
IKS 03.02	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tambah Data Dukung +	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	0,00			0,00	0,00		01-Oct-2025 11:22

IKS 03.03	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh Tambah Data Dukung➕	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00		0,00	0,00		01-Oct-2025 11.22	
IKS 03.04	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh Tambah Data Dukung➕	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	0,00		0,00	0,00		01-Oct-2025 11.22	
IKS 03.05	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	0,00		0,00	0,00		01-Oct-2025 11.22	
IKS 03.06	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	100,00	117,86	85,00	100,00	117,86	01-Oct-2025 11.22

IKS 03.07	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBU Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung➕	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76,00	76,00	100,00	120,90	76,00	100,00	120,90	01-Oct-2025 11.22
IKS 03.08	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh Tambah Data Dukung➕	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		01-Oct-2025 11.22
IKS 03.09	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Data Dukung3 ✓ Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	98,02	111,36	88,00	98,02	111,36	01-Oct-2025 11.22

(Sumber : Aplikasi Kinerja KKP, 2025)

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

IKS 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CBIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Pada triwulan III 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung indikator kinerja Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diantaranya :

- Telah dilaksanakan inspeksi CPIB kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja Lampulo dalam rangka sertifikasi CPIB diatas kapal pada tanggal 5 sampai 6 Juli 2025
- Pada tanggal 15 Juli 2025 telah dilakukan inspeksi sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas kapal PPS Kutaradja terhadap kapal KM. Balia Baru yang berukuran 54 GT dengan parameter

inspeksi pembongkaran ikan, standar fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan di kapal dan standar prosedur penanganan dan penyimpanan ikan dikapal

- SKIPM Aceh telah melakukan pendampingan terhadap buyer dan UPI dalam ekspor produk perikanan yaitu mempertemukan buyer dari Jepang dengan UPI Fisheries Indo Makmur pada 16 sampai 17 Juli 2025
- Pada 30 Juli SKIPM Aceh melakukan pendampingan percepatan layanan sertifikasi CBIB pada salah satu pelaku usaha yang berlokasi di Banda Aceh untuk komoditi Ikan Air Tawar, Ikan Lele dengan sistem bioflok
- SKIPM Aceh telah melakukan pendampingan percepatan layanan sertifikasi CBIB pada 5 Agustus 2025 dan penyuluh perikanan Kota Banda Aceh yang bertempat di Gampong Alue Deah Teungoh dengan komoditi udang vanname yang dibudidayakan secara tradisional
- Pada tanggal 13 dan 14 Agustus SKIPM Aceh telah melakukan surveilan Cara Pembenihan Ikan yang BAik (CPIB) pada unit pembenihan PT. Surya Windu Pertiwi di Kabupaten Bireuen dengan ruang lingkup komoditinya adalah Udang Vanname

Tabel 1 Target dan Realisasi IKS 01.01 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	-	-	-	-	100	-	70	100	120	70	120	-	-

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X 100\%$$

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal; xn = Jumlah dari unsur pembentuk.

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT

Tabel 2 Rekapitulasi Sertifikasi CPIB Kapal SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan III

NO	TANGGAL INSPEKSI	NAMA KAPAL	UKURAN KAPAL	GRADE SERTIFIKAT	NOMOR SERTIFIKAT
1	5 JULI 2025	KM. ATHA DROU	60 GT	C	ID – CPIB – K – 11 - 250456
2	5 JULI 2025	KM. FAKTA BARU 02	57 GT	C	ID – CPIB – K – 11 - 250457
3	6 JULI 2025	KM. BERINGIN BARU	60 GT	D	ID – CPIB – K – 11 - 250458
4	9 JULI 2025	KM. BALIA	59 GT	D	ID – CPIB – K – 11 - 250459
5	15 JULI 2025	KM. BALIA BARU	54 GT	C	ID – CPIB – K – 11 - 250484
6	30 AGUSTUS 2025	KM. MUDA BALIA	59 GT	B	ID – CPIB – K – 11 - 250729

Perhitungan setiap unsur terlebih dahulu dilakukan masing-masing dengan membandingkan jumlah permohonan masuk dari setiap jenis layanan sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer dibagi dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan dari layanan tersebut.

Pada periode triwulan III, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 adalah sebanyak 6 sertifikat dari 6 permohonan sertifikasi Cara Penangkapan Ikan Yang Baik (CPIB Kapal). Sehingga capaian indikator Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah 100 %.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru setelah BPPMHKP dibentuk. Berdasarkan data pada aplikasi kinerjaku, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 adalah sebesar 100 %, sama dengan capaian periode triwulan sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra belum dapat dilakukan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Upaya yang dilakukan oleh SKIPM Aceh dalam upaya mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan koordinasi, update data dan informasi, serta referensi pelaksanaan kegiatan secara berkala. Pada masa transisi SOTK sampai dengan saat ini, diharapkan dengan kerja sama seluruh sumber daya yang ada dan koordinasi dengan stakeholder terkait dapat meminimalisir kegagalan pencapaian indikator kinerja.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya serta dukungan personil non PNS serta partisipasi penyuluh perikanan. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan Sektor Produksi Primer.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 merupakan salah satu kegiatan yang terkena efisiensi.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja ini dengan melaksanakan inspeksi, melakukan pengambilan dan pengujian contoh, dan melaksanakan survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan atau peraturan terkait kepada pengguna jasa, melaksanakan program yang telah direncanakan, koordinasi dan kerjasama antara petugas atau inspektur mutu dan/atau tim pusat, penyuluh perikanan serta unit pelaksana teknis eselon I terkait.

Gambar 6 Rangkaian Kegiatan Sektor Produksi Primer



Gambar 7 Sertifikat CPIB Kapal

[illegible][illegible][illegible][illegible]

IKS 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah maupun secara manual. Berikut formula perhitungan indikator kinerja ini :

$$\% X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP/SSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

1. Capaian Indikator Utama

Tabel 3 Target dan Realisasi IKS 01.02 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisas TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	-	-	-	-	106,66	100	70	100	120	70	120	-	-

Layanan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Produk (SKP), yang menjadi tugas baru yang dilaksanakan oleh SKIPM Aceh Tahun 2025 triwulan III tidak terdapat permohonan sertifikasi SKP yang masuk ke dalam sistem. Namun, pada triwulan ini terdapat realisasai serifikasi kegiatan HACCP sebanyak 2 sertifikat seperti data terlampir.

Tabel. Data Kegiatan HACCP Tahun 2025 Triwulan III

NO	NAMA UPI	ALAMAT	No	RUANG LINGKUP	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	GRADE SERTIFIKAT	TANGGAL INSPEKSI	TANGGAL TERBIT	BERLAKU SAMPAI	TIM INSPEKTUR MUTU
1	PT. Yakin Pasifik Tuna	Komp. PPS Lampulo, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia	1	Frozen Tuna	375/PM/HACCP/PB/09/25	B	23-Sept-25	29-Sept-25	29-Sept-25	- Silvia Wijaya
			2	Frozen Demersal Fish	374/PM/HACCP/PB/09/25	B				- Retno Sari Putri

Gambar 8 Sertifikat HACCP dari Aplikasi HONEST

SERTIFIKAT PENERAPAN HACCP PT TUNA PLUS Tbk - KUSTEN	
Kantor: PT Tuna Plus, Jl. Husein Sastranegara Gang Lembang, Desa Lembang, Kec. Kula Sari, Kota Bandung, Aceh - Indonesia. Telp. (05 411) 8552200, Fax (05 411) 8552208	
Kekua Tim	Silva Wijaya S.P., M.Si
Anggota Tim	
Status LPI	LAMA
Tanggal Inspeksi	23 September 2023
Tanggal Target Pembekuan	23 Oktober 2023
	FROZEN TUNA
Keterangan	Pemabekuan Ruang Lunghar
Proses	-
Receiving, Processing, Freezing, Packaging, storing, Cold Storing, Stuffing	
Tanggal Valid	29 September 2025
Tanggal Revisi	29 September 2027
Ruang Sertifikasi	8
No. Sertifikasi	2/STPM/HACCP/00003

[illegible]

1. A = HACCP

- Permohonan HACCP Tahun 2025 Triwulan III = 2
- HACCP Yang Diterbitkan Tahun 2025 Triwulan III = 2
- Persentase Capaian HACCP : $(A) = \frac{2}{2} \times 100 \% = 100 \%$

2. B = SKP

- Data Data Sertifikat Kelayakan Pengolahan Tahun 2025 Triwulan III
- Permohonan Sertifikat = Nilhil
- Sertifikat Yang Diterbitkan = Nihil
- Tidak Dilakukan Perhitungan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 triwulan III sebagai berikut:

$$\% X = \frac{100}{1} X 100 \%$$

$$\% X = 100 \%$$

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Sesuai dengan data kinerja, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh sama besarnya dengan periode triwulan I sebesar 100 %. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan data kinerja tahun 2024 capaian indikator kinerja periode ini sebesar 106,66 %. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2023 tidak terdapat indikator kinerja ini dalam dokumen kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra 2025 – 2029 belum dapat dilakukan sampai dengan laporan ini dibuat.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025 triwulan III. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diharapkan dapat terwujud dengan penerapan rencana aksi dan dukungan pihak-pihak terkait

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan, baik pada kegiatan inspeksi dan verifikasi maupun monitoring dan evaluasi secara digital.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun 34.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.318.960,- atau senilai lebih dari 90 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diantaranya yaitu : melakukan inventarisasi masa berlaku

HACCP dan SKP semua UPI; membuat program terkait *schedule* perpanjangan sertifikat HACCP; melakukan update data-data terkait; meningkatkan kapasitas SDM; serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak UPI. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja ini.

Gambar 9 Kegiatan Sektor Produksi Pasca Panen Tahun 2025 Triwulan III



IKS 3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil kelautan dan perikanan.

Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya tidak hanya merupakan salah satu upaya dalam mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan global dimana tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dan bergizi semakin meningkat. Kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan di pelabuhan perikanan, pasar

dan *supplier/miniplant*, ini sebagai upaya pencegahan sebelum bahan pangan sampai kepada konsumen sehingga ketahanan pangan dan keamanan pangan secara global dapat terwujud.

Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di Kabupaten/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, *supplier*, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Pengambilan contoh produk perikanan yang diperdagangkan di pasar tradisional dan modern yang dilakukan oleh Inspektur Mutu bersama dengan pihak pengelola pasar tradisional dan pasar modern. Contoh tersebut selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap suhu, organoleptik, uji kimia dan mikrobiologi di laboratorium yang terakreditasi. Selain itu, dilakukan juga pengamatan kondisi sarana prasarana dari lokasi usaha yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk menilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik.

1. Capaian Indikator Kinerja

Monitoring penjaminan mutu perikanan domestik terus dilaksanakan oleh SKIPM Aceh. Pada tahun 2025 dilakukan monitoring penjaminan mutu perikanan domestik dalam bentuk kegiatan “Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat di pasar domestik yang berlokasi di Kota Banda Aceh. Sentra penyedia pangan sehat yang menjadi lokus adalah pasar dan pelabuhan perikanan. Lokasi pelaksanaan implementasi Inpres Nomor 01 Tahun 2017 dengan lokasi pelaksanaan di 1 (satu) kabupaten/kota, yaitu Kota Banda Aceh dengan lokus PPS Kutaradja dan Pasar Seutui. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun atau dengan periode pelaporan pada tiap semester.

Tabel 4 Target dan Realisasi IKS 01.03 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Indikator kinerja pada periode sebelumnya menggunakan satuan lokasi dan cara perhitungan yang berbeda dengan periode tahun 2025. Berdasarkan tabel data realisasi indikator kinerja ini serta data pada kinerja pada tahun 2024, periode yang sama triwulan III belum dilakukan perhitungan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik. Jika diperbandingkan dengan data tahun 2024 kegiatan dilaksanakan di 2 lokasi kabupaten/kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh yang terdapat pada dokumen Renstra terbaru belum dapat dilakukan perhitungan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Perlu peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. SKIPM Aceh berusaha dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dari indikator ini baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan dukungan dari pihak-pihak terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melibatkan personil fungsional umum dengan pengalaman yang cukup, serta dengan persiapan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh personil.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Tahun 2025 mengalami efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik adalah dengan melakukan persiapan kegiatan periode semester II. Selain itu peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat, koordinasi dan rapat evaluasi dan persiapan pelaksanaan periode selanjutnya.

IKS 4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Berikut formula yang digunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja

Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 :

$$x = \frac{A-B}{A} \times 100 \%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah ditentukan target dan periodenya. Pada periode Tahun 2025 triwulan III indikator ini belum dilakukan perhitungan. Data Ekspor SKIPM Aceh Tahun 2025 Periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember akan dilakukan perhitungan kembali pada akhir tahun.

Tabel 5 Target dan Realisasi IKS 01.04 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2020-2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja SKIPM Aceh pada periode tahun 2025, terdapat indikator kinerja terkait ekspor yaitu Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina dengan target sebesar 99 % dan capaian sebesar 100 %

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan Renstra belum dapat dilakukan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kinerja indikator ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat program penggunaan teknologi atau sistem informasi baru untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan ekspor.

6. Realisasi Anggaran

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan terkait ekspor diantaranya yaitu Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor dengan pagu anggaran dan kegiatan Produk Perikanan yang Diawasi dan Diselesaikan Kasus Mutu Ekspor Impor-nya dalam efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan koordinasi lingkup internal BPPMHKP serta melakukan sosialisasi eksternal ke pengguna jasa dan *stakeholder* terkait

IKS 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Aspek pengukuran IKPA meliputi aspek : kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Secara teknis aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker dengan fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Hal-hal penting dalam perhitungan indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10 %
 - ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekwensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekwensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
 - ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
 - ✓ Semakin rendah frekwensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik
2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10 %
 - ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
 - ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan, khusus triwulan 1 batas pemutakhiran adalah 10 hari kerja bulan Februari
 - ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA semakin baik
3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20 %
 - ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
 - ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
 - ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
4. Dispensi SPM – Bobot Penilaian 5 %
 - ✓ Dispensi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM yang disampaikan ke KPPN dan telag diterbitkan SP2D nya pada triwulan IIV
 - ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio dispensasi SPM sebagaimana berikut :

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mempunyai target dengan pengukuran secara semester. Pada tahun 2025 triwulan III indikator ini belum dilakukan perhitungan. Capaian indikator tersebut sesuai dengan data dari aplikasi OM-SPAN modul Monev PA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan data capaian seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan semester I 2025, SKIPM Aceh menempati urutan ke 50 (lima puluh) dari sejumlah 380 satuan kerja. Berikut ditampilkan tabel target dan realisasi capaian indikator kinerja ini.

Tabel 6 Target dan Realisasi IKS 02.02 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	98,28	97,02	96,17	97,47	98,41	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada semester I tahun 2024 terdapat nilai capaian sebesar 98,65. Jika dibandingkan dengan nilai IKPA BPPMHKP pusat nilai ini jauh lebih tinggi karena BPPMHKP 97.26.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data Renstra indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 2 tahun sebelumnya, terdapat peningkatan capaian kinerja, yaitu pada tahun 2023 sebesar 97,47 dan tahun 2024 naik menjadi sebesar 98,41. Pada tahun 2025 periode triwulan III belum dapat diperbandingkan dengan dokumen Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian Indikator Kinerja telah dilakukan upaya seluruh tim di SKIPM Aceh untuk melakukan pemenuhan ketentuan yang menjadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal, namun terdapat sebagian yang mengalami efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai IKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM untuk periode mendatang.

IKS 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Secara otomatis nilai capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dapat diperoleh melalui aplikasi monev Kemenkeu di halaman <https://monev.kemenkeu.go.id/> yang terkoneksi juga dengan aplikasi SAKTI. Sedangkan secara manual formula perhitungan indikator kinerja ini dapat dilihat dalam tampilan dibawah ini :

Cara Perhitungan:		
NKA Unit Eselon I		
NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:		
Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

CIKSS	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
RIKSS _i	: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
TIKSS _i	: Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
n	: Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2) Nilai Efektivitas Satker	
$NEf\ Satker = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$	
Keterangan :	
<i>NEf Satker</i>	: Nilai Efektivitas Satker
<i>RVRO_i</i>	: Realisasi Volume RO i
<i>TVRO_i</i>	: Target Volume RO i
<i>n</i>	: Jumlah RO seluruh Satker
b. Efisiensi	
$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$	
Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:	
$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$	
Keterangan:	
NKA UEI	: Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
CIKP	: Capaian Indikator Kinerja Program
NEf _{satker}	: Nilai Efektivitas Satker
NE _{satker}	: Nilai Efisiensi Satker
W _{CIKP}	: Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEf _{satker}	: Bobot Nilai Efektivitas Satker

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 triwulan III indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran belum dilakukan penilaian. Nilai kinerja ini diperoleh dari aplikasi monev Kemenkeu yang telah terkoneksi dengan aplikasi SAKTI.

Tabel 7 Target dan Realisasi IKS 03.02 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2020-2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	-	-	-	92,50	-	-	-	-	71,5	-	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024 terdapat indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang dilakukan secara otomatis perhitungan melalui <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Namun nilai ini tidak dapat diperbandingkan dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025, karena belum dilakukan perhitungan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025 triwulan III belum dilakukan perhitungan dan diperbandingkan dengan Renstra terbaru.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Pada tahun 2025 triwulan III Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala terhadap penyerapan anggaran, konsistensi dan capaian output.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal, namun terdapat sebagian yang mengalami efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai NKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan dalam pelaporan di aplikasi SAKTI serta melakukan strategi untuk menjaga konsistensi rencana penarikan (awal) dengan realisasi anggaran serta rencana penarikan anggaran (revisi). Selain itu meningkatkan konsistensi penginputan capaian realisasi output (CRO) secara periodik atau perbulan, yang mana mewajibkan partisipasi seluruh satuan kerja pelaksana

anggaran untuk melakukan entri data pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi antara lain memuat program, realisasi anggaran dan volume output kegiatan, serta mencakup variabel penyerapan, konsistensi, CRO, dan efisiensi. Selain itu dilakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan indikator kinerja melalui <https://monev.kemenkeu.go.id>.

IKS 10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis melalui sistem yang telah ditentukan.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula perhitungan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 triwulan III, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, belum dilakukan perhitungan capaian. Capaian nilai IP ASN diperoleh atas kerjasama seluruh pegawai SKIPM Aceh yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat terkait kompetensi yang dapat meningkatkan profesionalitas kinerja.

Tabel 8 Target dan Realisasi IKS 03.04 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Indeks	81,57	82,36	83,45	89,89	91,94	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan periode perhitungan dan data capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 triwulan III tidak dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra terbaru, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh belum dapat diperbandingkan capaiannya.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN menjadi salah satu indikator kinerja utama yang terus mendapat perhatian dari seluruh pegawai. Selain itu Kepala SKIPM Aceh berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat meningkatkan kompetensi untuk mendukung kinerjanya. Terdapat upaya partisipasi seluruh pegawai dalam pelaksanaan bimbingan teknis atau diklat yang diselenggarakan oleh pusat BPPMHKP maupun instansi lain yang terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Seluruh pegawai memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mengikuti seminar, pelatihan dan bimbingan teknis terkait secara *daring*. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BPPMHKP, Unit eselon lain, e-milea KKP maupun penyelenggara eksternal lainnya.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tidak secara khusus dialokasikan. Terdapat pagu anggaran dukungan manajemen internal namun sebagian mengalami efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah dengan melakukan konsolidasi internal lingkup SKIPM Aceh serta melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan serta melakukan monitoring evaluasi secara periodik terhadap data IP ASN seluruh pegawai. Selanjutnya secara mandiri setiap pegawai PNS melakukan input data pada portal BKN dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh operator yang telah ditunjuk. Hal ini akan terus dilakukan pada periode selanjutnya.

IKS 11. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Aceh dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Penilaian evaluasi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Kinerjaku KKP. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP. Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP.

1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 9 Target dan Realisasi IKS 03.05 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	87,40	-	-	85,50	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2025 triwulan III indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh belum dilakukan perhitungan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Pada tahun 2024 ini telah dilakukan penilaian secara mandiri oleh Sekeretariat BPPMHKP bersama dengan Tim Penilai Internal lingkup KKP melalui LKE yang terdapat pada <https://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan data capaian SAKIP lingkup BPPMHKP, SKIPM Aceh menempati urutan tinggi jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis lainnya di seluruh Indonesia.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target Penilaian Mandiri SAKIP merupakan indikator kinerja yang tidak setiap tahun masuk dalam dokumen kinerja. Penilaian mandiri SAKIP telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup BKIPM pada tahun 2024. Terdapat unit kerja yang menjadi *sampel* uji petik penilaian SAKIP secara langsung yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal lingkup KKP. Pada tahun 2025 triwulan III indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh belum dapat diperbandingkan dengan dokumen Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah didukung oleh keterlibatan pimpinan dalam setiap unsur AKIP, pemenuhan dokumen, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Diperlukan peningkatan sumber daya pengelola kinerja baik melalui diklat atau bimbingan teknis baik secara langsung maupun online.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Selain itu terdapat efisiensi lainnya, karena indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang khusus terkait SAKIP, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal dan kegiatan terkait arsip.

6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran terkait dukungan manajemen yang mendukung indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh sebagian mengalami revisi dalam rangka efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan konsolidasi internal serta melakukan penyusunan dan pengumpulan dokumen akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung penilaian SAKIP SKIPM Aceh.

IKS 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I tahun s.d Triwulan III

Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dihitung dengan periode triwulanan dan menggunakan jenis atau pola perhitungan target atau realisasi data nilai posisi akhir. Indikator ini diperoleh berdasarkan data aplikasi SIDAK KKP secara otomatis. Berikut komponen perhitungan unsur serta tampilan gambar aplikasi SIDAK KKP tahun 2025 sebagai berikut :

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

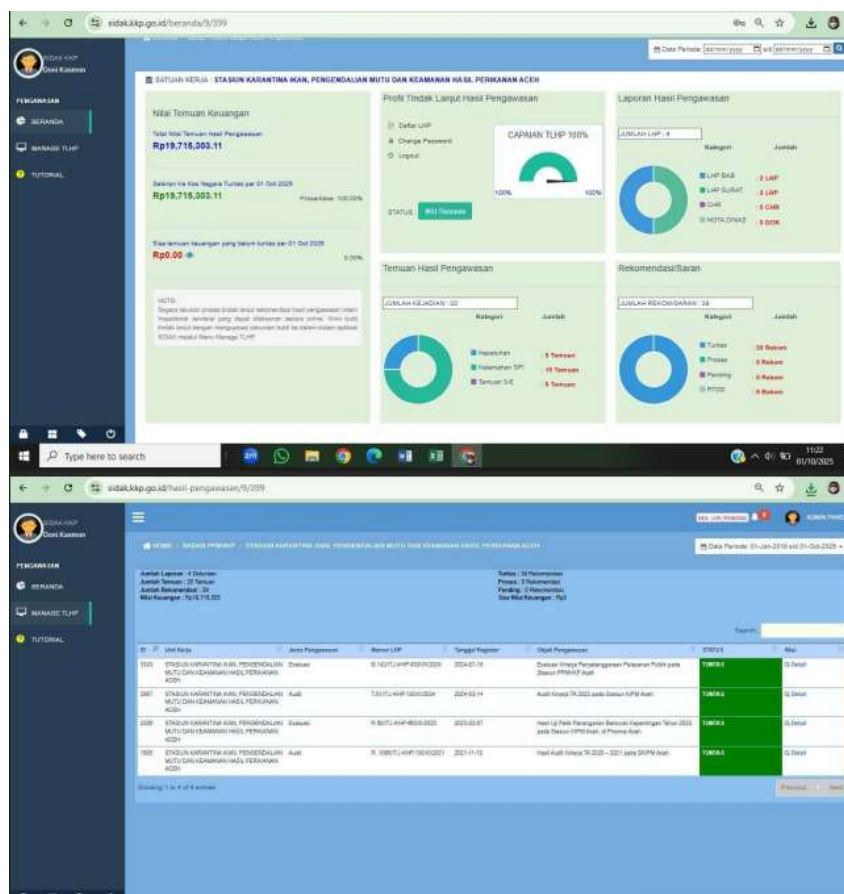
$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2024 diperoleh sebesar 100 %. Pada tahun 2024 SKIPM Aceh menjadi salah satu lokasi pengawasan audit oleh Inspektorat Jenderal KKP. Berdasarkan audit kinerja tersebut, SKIPM Aceh telah berupaya menindaklanjuti hasil temuan audit kinerja. Sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025, seluruh temuan dari pengawasan yang dilaksanakan telah selesai ditindaklanjuti. Berdasarkan data tersebut, capaian nilai TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah berstatus “SUKSES” dengan capaian sebesar 100 % dari target sebesar 85 %, Data tersebut bisa dilihat dari tampilan pada *dash board* aplikasi SIDAK (<http://sidak.kkp.go.id/login>) yang menjelaskan tindak lanjut hasil pengawasan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tampilan tangkap layar aplikasi SIDAK tahun 2025 triwulan III ditampilkan sebagai berikut.

Gambar 10 Capture Aplikasi Sidak KKP SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan III



Tabel 10 Target dan Realisasi IKS 03.06 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2024 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	100	100	100	100	-	85	100	117	85	117	85	117

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja tahun 2025, SKIPM Aceh mencatat capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan II yang diperoleh dari tangkapan layar portal SIDAK, nilai capaian pada triwulan III tetap berada pada angka 100%, yang menunjukkan kondisi bahwa SKIPM Aceh terus berupaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra, indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Pada tahun 2025 triwulan II tidak terdapat obyek pengawasan. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai diperlukan agar seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan dan dengan menyampaikan dokumen tindak lanjutnya secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun

KIPM Aceh telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap periode dan melakukan tindak lanjut pemenuhan dokumen atas rekomendasi Inpektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan.

IKS 13. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPM Aceh. dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ RUP PBJ} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100 \%$$

1. Capaian Indikator Kinerja

SKIPM Aceh telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung indikator kinerja terkait Rencana Umum Pengadaan PBJ adalah sebagai berikut :

- Hasil monitoring sementara realisasi penginputan data RUP Aceh telah sesuai dengan kebijakan pencatatan RUP 2025, Dimana pagu pengadaan barang/jasa sama nilainya dengan pagu RUP yang telah diumumkan.
- Pada Bulan Maret 2025 terdapat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, yang mewajibkan satuan kerja untuk melakukan revisi atas pagu RKAKL Tahun 2025. SKIPM Aceh telah melakukan upaya revisi sesuai Instruksi Presiden tersebut, dengan melakukan penyesuaian optimalisasi perencanaan PBJ data pada SIRUP.
- Melalui surat Sekretaris Jenderal (Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa) Nomor 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025, tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 TA 2025). Untuk capaian IKU Rencana Umum PBJ di lingkup BPPMHKP sudah mencapai 100 %.
- Mulai tanggal 24 Juni SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) berpindah halaman website di alamat <https://spse.inaproc.id/kkp/>
- Melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal (Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa) Nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025, perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025. Dimana disampaikan bahwa seluruh satuan kerja telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang 100 %. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai pagu terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantumkan dalam rekap RUP terumumkan pada aplikasi SIRUP.
- Sampai dengan waktu cut off data perhitungan triwulan 3, diperoleh informasi bahwa Unit Eselon I BPPMHKP telah lengkap/sesuai dalam mengumumkan pengadaan / belanja PBJ pada SIRUP atau sebesar 100 %.

- Seluruh Satuan Kerja Lingkup BPPMHKP Menggunakan Nilai Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT.
- Berikut tangkap layar tabel data dalam nota dinas tersebut diatas

Gambar 11 Tangkap Layar Nilai Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Sampai Dengan Tahun 2025 Triwulan III

Neraca Capaian RUP RUP TW 3 KOP. A...									
NO	Nama, Sater	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERJUMBUKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERJUMBUKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
1	Badan Pengembangan dan Pengawasan Mtu Hasil Kebijakan dan Peraturan	23,133,712,424	373,948,000	23,507,660,424	23,133,712,424	373,948,000	23,507,660,424	-	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN	2,227,785,000		2,227,785,000	2,227,785,000		2,227,785,000	-	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,486,140,000		1,486,140,000	1,486,140,000		1,486,140,000	-	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA	4,601,969,000		4,601,969,000	4,601,969,000		4,601,969,000	-	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800		154,755,800	154,755,800		154,755,800	-	100.00%
15	BALAI LULU STANDAR KIPM dan KHP	2,714,969,000		2,714,969,000	2,714,969,000		2,714,969,000	-	100.00%
16	SEKRETARAT BPPMHKP	6,369,048,000		6,369,048,000	6,369,048,000		6,369,048,000	-	100.00%
17	STASUN KIPM dan KHP KENDARI	351,241,000		351,241,000	351,241,000		351,241,000	-	100.00%
18	STASUN KIPM dan KHP MAHULU	35,000,000		35,000,000	35,000,000		35,000,000	-	100.00%
19	STASUN KIPM dan KHP BORDO	338,737,000		338,737,000	338,737,000		338,737,000	-	100.00%
20	STASUN KIPM dan KHP ACEH	1,035,194,000		1,035,194,000	1,035,194,000		1,035,194,000	-	100.00%
21	STASUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261,698		1,351,261,698	1,351,261,698		1,351,261,698	-	100.00%
22	STASUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000		436,771,000	436,771,000		436,771,000	-	100.00%
23	STASUN KIPM dan KHP CREBOW	2,045,141,000		2,045,141,000	2,045,141,000		2,045,141,000	-	100.00%
24	STASUN KIPM dan KHP GORONTALO	228,766,000		228,766,000	228,766,000		228,766,000	-	100.00%
25	STASUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000		190,000,000	190,000,000		190,000,000	-	100.00%
26	STASUN KIPM dan KHP KUPANG	-	58,810,000	58,810,000	-	58,810,000	58,810,000	-	100.00%
27	STASUN KIPM dan KHP MERAK	658,352,000		658,352,000	658,352,000		658,352,000	-	100.00%
28	STASUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055,000		768,055,000	768,055,000		768,055,000	-	100.00%

Pada tahun 2025 indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mempunyai target sebesar 76 %. Indikator ini memiliki periode pelaporan secara triwulanan dan jenis perhitungan data akumulasi akhir. Berikut data target dan realisasi indikator tersebut.

Tabel 11 Target dan Realisasi IKS 03.07 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2020-2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	-	-	-	76	100	120	76	120	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, perihal Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup BPPMHKP. Penilaian tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP tahun 2024 adalah sebesar 84,34 %. Nilai tersebut merupakan gambaran kegiatan pengadaan barang/jasa stasiun kerja yang mewakili seluruh unsur yang menjadi parameter penilaian. Secara detail nilai tersebut terdiri dari unsur ketersediaan manajemen resiko sebesar 10 %; perencanaan dan persiapan sebesar 13,75 %; presentase pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui SPSE sebesar 10,00 %; kesesuaian tahap pelaksanaan sebesar 31,84 %; laporan penyelenggaraan PBJ sebesar 3,75 %; serta persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan sebesar 15 %.

Berdasarkan data capaian kinerja indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya, karena periode sebelumnya pendekatan lebih kepada tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah sebesar 80. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, sehingga pada tahun sebelumnya belum ada. Capaian dengan target pada Renstra terbaru belum dapat diperbandingkan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan tim pengadaan barang dan jasa terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan operasional perkatoran, dimana sebagian pagunya mengalami perubahan nilai karena efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah dengan membuat perencanaan realisasi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan koordinasi dengan tim internal dan pusat terkait. Pada periode selanjutnya, SKIPM Aceh berupaya untuk terus meningkatkan nilai capaian indikator ini dengan melakukan koordinasi dengan tim Internal, PBJ Aceh, BPPMHKP Pusat dan LKPP.

IKS 14. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Mengacu pada Pedoman dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan: penetapan status unit kerja berpredikat Menuju WBK yaitu dengan memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 serta ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapat Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Predikat yang diperoleh merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit pada lingkungan kerja. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan tidak hanya dilakukan pada Unit Kerja yang menjadi *pilot project*, tapi juga dilakukan pada semua Unit Kerja yang berada di bawah tanggung jawab Unit Kerja eselon I, sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM hendaknya dapat memotivasi Unit Kerja lain untuk meningkatkan pembangunan Zona Integritas di Kementerian.

Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, maka perlu dilakukan pembinaan yang efektif. Pembinaan harus dilakukan terhadap Unit Kerja secara institusional dan terhadap pegawai pada Unit Kerja yang bersangkutan. Pembinaan terhadap Unit Kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa, mendapatkan prioritas tambahan anggaran dalam APBNP atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: Nilai Pengungkit yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan Nilai Hasil yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Unit Kerja di lingkungan BPPMHKP dengan kriteria penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri dan menggunakan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Formula yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah dengan menghitung prosentase nilai pembangunan integritas UPT diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal / BPPMHKP KKP.

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 indikator mengalami perubahan menjadi Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mempunyai target senilai 75. Pada tahun 2025 triwulan III belum dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja ini, karena target yang diperoleh menggunakan sistem perhitungan secara tahunan. Pada periode triwulan III seluruh komponen di SKIPM Aceh tetap berusaha menjaga konsistensi dan melakukan pembaharuan pemenuhan seluruh data dukung komponen pengungkit dan hasil secara berkala sesuai ketentuan.

Tabel 12 Target dan Realisasi IKS 03.08 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	% Capaian
1	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tidak dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2024 pendekatan yang dipergunakan adalah Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2024 dengan nilai capaian sebesar 81,98 dari target 75 atau setara dengan 109,31 % dari target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 adalah sebesar 75. Sampai dengan tahun 2025 triwulan III belum dapat diperbandingkan dengan dokumen Renstra terbaru.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan zona integritas adalah adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun zona integritas, penerapan budaya kerja BerAKHLAK, peningkatan integritas, peningkatan layanan, peningkatan kinerja serta penciptaan inovasi. Pemenuhan dokumen pengungkit dan reform pembangunan zona integritas sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 terus dilakukan pembaharuan oleh seluruh tim.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya oleh seluruh pegawai yang terlibat dalam mendukung indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk meraih predikat WBK, salah satunya dengan penggunaan teknologi dalam pemenuhan dokumen serta untuk mengikuti pelatihan pelatihan terkait.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh didukung oleh anggaran yang terdapat di kelompok dukungan manajemen, namun sebagian anggaran mengalami perubahan karena efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Pada periode selanjutnya, besar harapan melalui terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terbaru, khususnya setelah terbentuknya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Secara bertahap seluruh elemen dan SDM UPT khususnya di wilayah Aceh dibawah BPPMHKP mampu menciptakan inovasi baru dan memenuhi seluruh unsur penilaian pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dimana indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh memiliki beberapa unsur yang menjadi penilaian yaitu manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

IKS 15. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat :

<https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Berikut formula yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh :

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM unit pelayanan x 25

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada triwulan III tahun 2025 ini, SKIPM Aceh melakukan kembali pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, yaitu pelaksanaan kegiatan pada bulan Juli sampai September tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan merekap/mendata responden SKIPM Aceh sebanyak 20 (responden) responden yang mengisi kuesioner secara online dan terintegrasi pada link www.ptsp.kkp.go.id.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan SKIPM Aceh, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 98,02. Nilai capaian yang dianggap menggambarkan bahwa kinerja unit pelayanan ini dalam memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat masuk dalam kategori kinerja pelayanan “Baik”. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada SKIPM Aceh dipersepsikan baik oleh masyarakat pengguna jasa. Hasil pelaksanaan SKM telah dipublikasikan kepada publik melalui *social media*.

Gambar 12 Jenis Layanan BPPMHKP Aceh



Gambar 13 Infografis Data Nilai Capaian Perolehan Survei Kepuasan Masyarakat SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan III



Gambar 14 Capture Portal Penilaian Hasil SKM SKIPM Aceh Pada Aplikasi Susan KKP Tahun 2025 Triwulan III

The screenshot shows a web application interface for the SKM Detail Report. The browser address bar shows the URL: `ptsp.kkp.go.id/skm/p/laporan_rekap_upp_v/2025/3`. The page title is "Laporan SKM Detail" with a breadcrumb trail: "Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP". The user is logged in as "Stasiun KIPM Aceh".

Under the "Data IKM" section, there are two dropdown menus: "Triwulan 3" and "2025". A blue "Submit" button is located to the right of these filters. Below the filters, a message states: "50 Data terakhir Tw 3/2025 - Kepmen 20/2025, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel".

There are two "Download Data" buttons, one above and one below the table. The table has a "10" entries per page selector and a search box containing "Aceh". The table columns are: "Kd Es1", "Nama UPP", "Tahun", "Tw", "Rating", "Nilai IKM", and "Jml Responden".

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bmutu	Stasiun KIPM Aceh	2025	3	4.93	98.02	14

Below the table, it says "Showing 1 to 1 of 1 entries".

Tabel 13 Detail Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2025 Triwulan III

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,86	3,93	3,93	4,00	3,93	3,93	3,86	3,93	3,93
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	98,02 (A atau Sangat Baik)								

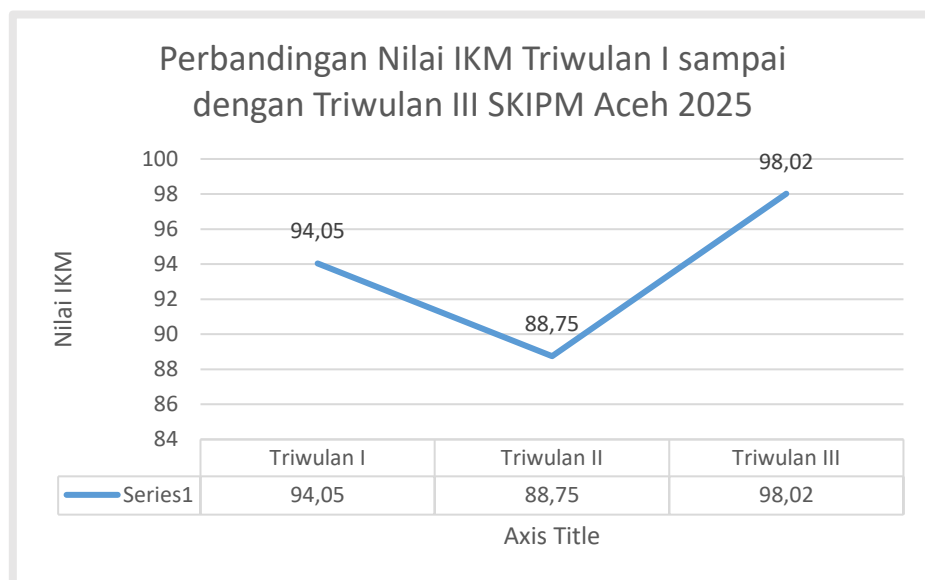
Tabel 14 Target dan Realisasi IKS 03.01 Tahun 2025 Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	-	-	-	-	94,05	88	98,02	111,39	88	111,39	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan nilai SKM triwulan II terkait capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh sebesar 88,75. Jika dilakukan perbandingan capaian terdapat peningkatan nilai dengan triwulan III menjadi sebesar 98,2. Selanjutnya dilakukan perhitungan intersepsi terlebih dahulu. Berikut tampilan perbandingan capaian dengan periode sebelumnya.

Gambar 15 Perbandingan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Tahun 2025



3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data pada dokumen Renstra capaian indikator Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh belum dapat dilakukan perbandingan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan. Analisa lebih lanjut telah diupayakan untuk menghindari terjadinya kesalahan input data pada pengisian oleh responden. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan pada nilai keseluruhan unsur pelayanan yang menjadi unsur survei kepuasan masyarakat dibandingkan capaian periode sebelumnya. *Human error* dimungkinkan dapat terjadi sebagai keputusan atau perilaku responden yang tidak tepat yang mengurangi atau berpotensi mengurangi efektivitas, keselamatan atau performa sistem yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi performa instansi. Hal ini menjadi informasi penting agar SKIPM Aceh untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya dengan Badan Karantina Indonesia di Aceh, karena sampai dengan saat ini secara sistem dan proses masih terkait dengan kegiatan pelayanan karantina ikan. Koordinasi harus terus ditingkatkan agar pengguna jasa layanan mendapatkan pelayanan lebih baik di masa yang akan datang.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, karena dalam implementasinya indikator ini melibatkan dukungan dari seluruh kegiatan bidang teknis pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 didukung melalui seluruh kegiatan terkait pelayanan dan teknis kepada pengguna jasa, namun sebagian mengalami perubahan karena efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

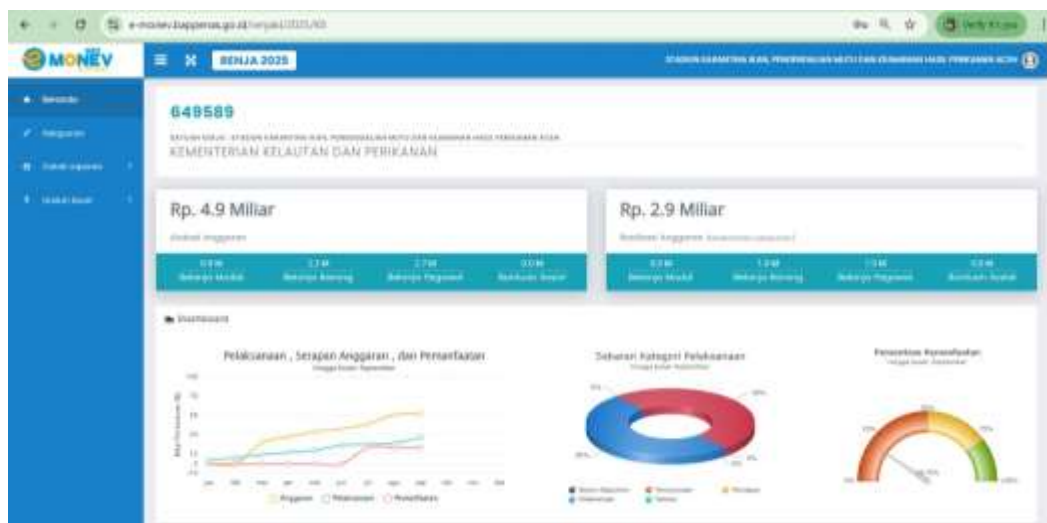
Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 adalah dengan melakukan pengembangan pelayanan publik untuk memudahkan pengguna layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah ditempuh sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan rapat internal petugas sosialisasi kepada pengguna jasa terkait sistem, produk dan spesifikasi jenis layanan; publikasi prosedur layanan dan prosedur persyaratan melalui media cetak (*banner*, brosur, dll) dan media elektronik / media sosial.

3.2. Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 diarahkan untuk target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran SKIPM Aceh tahun 2025 berdasarkan data RKAKL dengan pagu awal adalah sebesar Rp. 4.909.192.000,- hingga pagu terbaru berdasarkan revisi per September 2025 adalah sebesar Rp. 3.889.928.000 ,-. Nilai persentase realisasi anggaran atau keuangan SKIPM Aceh pada tahun 2025 hingga akhir bulan September terserap sebesar 73,75 %, dengan nilai Rp. 2.868.913.355,-. Pencapaian atau realisasi ini tentunya adalah upaya maksimal yang dapat dilakukan dan merupakan hasil kerja sama seluruh komponen di SKIPM Aceh.

Selama akhir periode tahun 2025 triwulan III terdapat perubahan pagu anggaran untuk efisiensi anggaran. Strategi atau rencana untuk periode selanjutnya, SKIPM Aceh akan lebih memperkuat sisi perencanaan kegiatan dan lebih cermat dalam melakukan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan ditetapkan, dan secara periodik akan dilakukan konsolidasi serta monitoring dan evaluasi. Selain itu SKIPM Aceh berupaya adaptif melakukan upaya mitigasi resiko dan realistis dalam menghadapi kebijakan-kebijakan atau penyesuaian otomatis yang masih diterapkan dalam pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya.

Gambar 16 Komposisi Pagu dan Detail Realisasi Tahun 2025 Triwulan III



Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/2025>

3.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Stasiun KIPM Aceh berdasarkan data sistem informasi kepegawaian hingga bulan Maret tahun 2025 sebanyak 16 orang PNS, 5 orang PPPK dan Non PNS sebanyak 7 orang. Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja terbaru, dimana dengan terbentuknya BPPMHKP. Berikut data jumlah pegawai di SKIPM Aceh.

Tabel 15 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural (Kepala SKIPM Aceh)	1 Orang
2	Ketua Tim Kerja	1 Orang
	a. Dukungan Manajemen / Analis Pengelolaan Keuangan APBN	1 Orang
	b. Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
	c. Pengawasan, Pengendalian dan Informasi / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
	d. Penerapan Standard dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
3	Fungsional Tertentu :	
	a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	1 Orang
	b. Asisten Inspektur Mutu	3 Orang
	c. Pranata Komputer	1 Orang
4	Fungsional Umum	
	a. Analis Mutu Hasil Perikanan	2 Orang
	b. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Orang
	c. Bendahara Pengeluaran	1 Orang
	d. Pengadministrasi Bahan Pengawasan dan Pengendalian	1 Orang
	e. Pengelola Layanan Operasional	1 Orang
5	PPPK	5 Orang
6	Tenaga Non PNS	7 Orang
Total		28 Orang

Tabel 16 Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Magister (S2)	5 Orang
2	Sarjana / Diploma IV (S1/DIV)	7 Orang
3	Diploma 3 (D3)	3 Orang
4	SLTA / Sederajat	1 Orang

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pengukuran kinerja di SKIPM Aceh dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan data pada aplikasi kinerja SKIPM Aceh. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) September Tahun 2025 adalah sebesar 118,18 (kategori : istimewa), dengan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja tercapai melebihi target (persentase 120 %) dan 2 (dua) indikator kinerja melebihi target (persentase lebih 100 %). Telah dilakukan upaya dan strategi agar capaian atau realisasi indikator kinerja SKIPM Aceh dapat terus meningkat di masa yang akan datang dan memenuhi ketentuan SMART.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan indikator kinerja SKIPM Aceh yang disepakati pada perjanjian kinerja tahun 2025 triwulan II telah tercapai sesuai rencana. Namun dari bidang pengendalian dan pengawasan mutu priemer pada triwulan II ini belum dapat terlaksana hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain regulasi yang belum konsisten. Tantangan yang dihadapi SKIPM Aceh ke depan semakin luas sebagai akibat dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pengendalian mutu dan pengawasan hasil perikanan; serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia. Selain itu, salah satu tantangan yang perlu dipersiapkan kedepan adalah adanya perubahan atau penyesuaian struktur organisasi dan tata laksana kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dimana BPPMHKP menjadi Otoritas Kompeten terhadap pemenuhan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi SKIPM Aceh ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur; perlunya pemantapan regulasi dan sistem pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKIPM Aceh dan sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut

- Meningkatkan kualitas komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder baik internal (BPPMHKP Pusat) maupun eksternal (Pemerintah Aceh, Bea Cukai, BKHIT, dll) guna memperoleh hasil maksimal dalam pengawasan dan pengendalian mutu primer.
- Melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan pembangunan zona integritas dan pemenuhan dokumen di Stasiun KIPM Aceh agar lebih optimal.

Demikian laporan kinerja SKIPM Aceh tahun 2025 triwulan III ini dibuat, semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pengelolaan dan pelaporan kinerja SKIPM Aceh pada masa yang akan datang.